

**Pengelolaan Irigasi Oleh Himpunan Petani Pemakai Air “Tirtosari”
di Desa Kesambirampak Kabupaten Situbondo**

***Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in
Kesambirampak Village, Situbondo Regency***

Ernawati, Hary Yuswadi
Prodi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember
Email: hary_yuswadi.fisip@unej.ac.id

Abstract

Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports agricultural productivity is the availability of irrigation water suitable for crop needs. In this case, irrigation cannot be separated from Irrigation Services, Agricultural Services, and HIPPA. Initially, village irrigation management was carried out by an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure. In its implementation, village irrigation management faced many obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management of agricultural irrigation by HIPPA. This study uses qualitative methods, and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many factors cause ineffectiveness in irrigation management. One of them is weak coordination in the HIPPA organization. It is even worse with the emergence of money politics in water distribution among farmers and water supervisors.

Keywords: Irrigation management, Water User Farmer Association, farmer, irrigation service.



Abstrak

Ada banyak faktor yang mendorong keberhasilan program ketahanan pangan. Salah satu faktor teknis yang sangat mendukung produktivitas pertanian adalah ketersediaan air irigasi yang sesuai untuk kebutuhan tanaman. Dalam hal ini, irigasi tidak dapat dipisahkan dari Layanan Irigasi, Layanan Pertanian, dan HIPPA. Pada awalnya, pengelolaan irigasi desa dilakukan oleh seorang inspektur irigasi bernama ulu-ulu yang berada di tingkat terendah dalam struktur organisasi desa. Dalam implementasinya, pengelolaan irigasi desa mengalami banyak kendala, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam distribusi air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan manajemen irigasi pertanian oleh HIPPA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa banyak faktor menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan irigasi. Salah satunya adalah lemahnya koordinasi dalam organisasi HIPPA. Ini semakin buruk dengan munculnya politik uang dalam distribusi air di kalangan petani dan pengawas air.

Kata kunci: Pengelolaan irigasi, Asosiasi Petani Pengguna Air, petani, layanan irigasi.



Pendahuluan

Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan merupakan salah satu desa yang memberikan kontribusi terbesar dalam sector pertanian. Desa tersebut terbagi menjadi 7 dusun yaitu Krajan, Sarse, Nyior Cangka, Karang Malang, Karang Layar, Rambutan dan Pajuko'an. Produksi pertanian tanaman pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat diantaranya adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan lain-lain.

Keberhasilan program ketahanan pangan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam produksi pertanian. Dalam hal ini, salah satu faktor teknis yang sangat mendukung dalam produktivitas pertanian adalah ketersediaan air irigasi yang baik dan sesuai kebutuhan tanaman. Air merupakan material yang penting dalam menjaga seluruh kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu untuk kebutuhan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Hal tersebut menjadikan air menjadi unsur penting dan menjadilah satu kunci keberhasilan dalam produksi pertanian.

Ketersediaan air bagi petani merupakan faktor mutlak bagi petani. Sebab yang dibutuhkan oleh tanaman adalah air yang terdapat dalam tanah yang ditahan oleh butir-butir tanah dan tanaman akan sangat peka terhadap kekurangan air pada masa mudanya. Selama ini masyarakat petani menganggap air sebagai milik umum (*Public Goods*) sehingga dalam pemakaiannya tidak memerlukan biaya ataupun aturan-aturan khusus. Aturan yang berlaku atas fakta kebutuhan air dari masyarakat petani umumnya tidak dalam bentuk tertulis. Hal ini mengancam keberadaan irigasi desa, terutama dalam memperoleh hak memanfaatkan air.

Jika kita berbicara tentang irigasi desa, tentu tidak lepas dari peran HIPPA, Dinas Pengairan, dan Dinas Pertanian. Pada awalnya pengelolaan irigasi desa dilakukan oleh petugas air yang sering disebut dengan *ulu-ulu* yang merupakan unsur terbawah dalam perangkat desa. Secara struktural jika dilihat dalam pemerintahan desa posisi Ulu-Ulu dan HIPPA berada di bawah lembaga desa. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pemerintah melalui kebijakannya yaitu Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1982 tentang pengelolaan irigasi tersier dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan petani pemakai



air. Dalam hal ini, pemerintah menganjurkan untuk pembentukan lembaga sebagai wadah bagi petani pemakai air dalam sebuah lembaga yang disebut *Perkumpulan Petani Pemakai Air* (P3A).

Keterikatan struktur organisasi masyarakat irigasi antara kelompok petugaspemerintah dengan kelompok petani pemakai air umumnya sangat lemah. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kelemahan sistem pengelolaan irigasi yaitu karena kurangnya koordinasi antara Dinas Pengairan dan petugas irigasi desa yang masih mementingkan kepentingan pribadi. Selain itu, juga terjadi karena beberapa sebab, antara lain belum terpadunya pemahaman tujuan irigasi antara kelompok petugas irigasi pemerintah dan kelompok masyarakat petani pemakai air. Bagi petugas irigasi pemerintah, tujuan irigasi adalah keberhasilan program pengadaan pangan melalui usaha tani secara intensif.

Pembahasan

1. Kondisi Geografis Desa Kesambirampak

Wilayah Desa Kesambirampak secara Geografis dengan luas wilayah 291.817 Ha dengan prosentase 24 %. Dengan Topografi wilayah Desa Kesambirampak berada pada ketinggian 1 m dari permukaan air laut. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 124 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Kesambirampak beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 62% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober. Iklim Desa Kesambirampak sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Situbondo, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April – November.

a. Jenis Komoditas yang Diusahakan

Pengelolaan usaha tani, dimana saja dan kapan saja, dalam hakikatnya akan dipengaruhi oleh perilaku petani yang mengusahakan. Alam dan tanah merupakan faktor asli dalam segala bidang produksi, khususnya dalam bidang pertanian. Namun demikian ada beberapa pendapat yang memasukkan bahwa dalam produksi pertanian, selain faktor alam dan tanah “*Manajemen*” juga termasuk dalam faktor-faktor produksi pertanian.

Kebiasaan masyarakat desa Kesambirampak, dalam mengelola usaha tani , pada



umumnya petani tidak menguasai permasalahan atau kondisi yang dia hadapi sehingga merasa kebingungan jika terjadi perubahan kondisi. Sebagai akibatnya petani tidak dapat meraih kemampuan peluang yang ada. Komoditas tanaman yang diusahakan saat ini sudah dilakukan dari sejak dulu yaitu pertanian padi, seperti pernyataan Samsuri:

“Ya paling banyak kalau disini padi. Sejak jaman embah saya dulu sudah menanam padi yang paling sering ditanam, apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Keseringan padi”. (Wawancara Tanggal 17 November 2017, Pukul 08.00 WIB)

b. Potensi Unggulan

Desa Kesambirampak memiliki potensi yang bagus untuk daerah pertanian karena kondisi tanah di daerah tersebut merupakan jenis tanah gembur. Kegiatan penduduk berdasarkan penggunaan lahan di bidang pertanian Kecamatan Kapongan seluas 4.455 ha, yang digunakan sebagai lahan perkebunan 1.035 ha, ditamani hutan rakyat 284 ha, padang penggembalaan 60 ha, lahan bukan pertanian 1909 ha, dan dijadikan sebagai lahan persawahan 2.441 ha.

Jumlah produksi padinya lebih banyak dari pada jenis pertanian lainnya untuk setiap tahunnya. Jumlah air yang tepat untuk diberikan kepada sawah milik petani, waktu pemberian air, dan tersedianya kebutuhan air menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan panen padi. Akan tetapi lambat laun, hubungan antara hasil produksi dengan luas areal sawah mengalami penurunan. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Agus:

“Petani sini dari dulu itu lebih banyak menanam padi. Kalau sudah musim ke3 (musim kemarau) biasanya jagung. Ya kadang-kadang juga menanam terong dan cabe. Tapi jarang”. (Wawancara Tanggal 27 November 2017, Pukul 08.30 WIB).

c. Kelembagaan Desa dalam Pengelolaan Irigasi

Dalam pengelolaan irigasi diatur oleh sistem kelembagaan yang berlaku dalam kehidupan tradisional di setiap wilayah-wilayah masing-masing. Irigasi adalah bagian yang integral dan esensial dari kehidupan desa. Struktur kehidupan desa tidak akan lengkap tanpa juga



mengatur sistem pengelolaan dan penggunaan air (Suzanne, 1995:40). Irigasi di Desa Kesambirampak termasuk pada irigasi sederhana yang memiliki bangunan semi permanen. Akan tetapi, sistem pembagiannya belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengukur. Dalam mengelola sumber daya air, ada petugas irigasi desa yang disebut dengan *ulu-ulu* yang bekerja sama dengan petugas irigasi pemerintah. Untuk hal yang teknis dan semi teknis dikelola oleh Dinas Pengairan sampai ke saluran sekunder, sementara yang tersier dan saluran cacing ke sawah-sawah diserahkan kepada petani pemakai air.

Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Pengairan yang merupakan lembaga pemerintah tidak menangani secara langsung distribusi air pada petani. Hal ini disebabkan pembagian air dari saluran tersier sudah diserahkan kepada lembaga HIPPA. Peran HIPPA sudah tidak berfungsi lagi yang menyebabkan distribusi air petani menjadi tidak teratur lagi. Oleh karenanya masyarakat petani dianggap cenderung berlebihan dalam penggunaan air irigasi tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

2. Tata Kelola Irigasi Yang Tidak Efektif

a. Kompromi dan Kompetisi

Soekanto, (2001:218) menjelaskan Persaingan atau Kompetisi dapat diartikan sebagai suatu proses menyalurkan keinginan –keinginan yang bersifat kompetitif dari orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Sifat –sifat manusia pada umumnya adalah semakin banyak seustau dihargai, semakin meningkat keinginan untuk memperolehnya.

Kebutuhan air bagi petani merupakan faktor dasar kebutuhan petani, baik jumlah maupun kualitasnya. Artinya jika air sulit untuk didapat, kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan antar petani pengguna air irigasi dalam kesehariannya.

b. Politik Uang dalam Tata Kelola Irigasi

Politik menurut Maurice Duverger (1998) mengatakan bahwa politik adalah bagian dari masalah kekuasaan. Kekuasaan adalah seluruh jaringan lembaga-lembaga (*institutions*) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini, suasana dominasi beberapa orang atas orang-orang lain. Pertama, bilamana orang-orang melihat politik pada dasarnya sebagai arena pertarungan atau medan pertempuran. Dalam hal ini kekuasaan memungkinkan mereka yang berhasil merebut dan mengontrolnya untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya di dalam masyarakat.



Dalam tata kelola irigasi yang paling rawan terjadinya persaingan pada saat musim kemarau. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konflik atas pengelolaan air menjadi bagian yang pernah bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan air pengairan merupakan fakta dasar bagi pertanian menempatkan masalah air irigasi sebagai suatu hal yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman (untung-rugi).

Mereka yang punya uang biasanya dominan lebih mendapatkan air sesuai waktunya. Jadi perbandingan banyaknya uang mempunyai peranan tersendiri bagi tukang turap (*Ulu-ulu*).

Nono :

” Ya itu. Sama tukang turapnya harus komunikasi yang baik. Kadang ya itu, tukang turapnya jarang ngontrol air kalau gak di kasih uang. Sekali turap itu paling tidak ya 10 rb”.

Pihak pemegang politik uang yang dimaksud dalam pengelolaan irigasi desa yaitu tukang turap (*Ulu-ulu*) akan memberi air kepada para petani apabila ia sudah membayar uang atau lainnya. Tanpa disadari kebijakan tersebut akhirnya berdampak pada keadilan petani dalam memperoleh air.

c. Konflik Perebutan Air

Konflik adalah unsur yang menjadi fenomena paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik (Korlublurn, 2003: 294).

Air berpotensi menimbulkan konflik, apabila ketersediannya tidak seimbang dengan penggunaan air itu sendiri. Ketidakseimbangan inilah dirasakan para petani . Seperti yang di ungkapkan oleh Samsuri:

“Repot dik, biasanya konfliknya itu musim kemarau. Karena para petani saling merebut untuk mendapatkan jatah air. Kadang sudah tau gilirannya saya, tiba-tiba sawah yang punya totok itu yang mencuri atau memutus aliran airpunyak saya”. (Wawancara Tanggal 17 November 2017, Pukul 08.00 WIB).

Menurut Samsuri, jika tidak menggunakan cara seperti itu maka ia harus menunggu lama



untuk mendapatkan air. Untuk itulah agar air mudah diperoleh para petani langsung melaporkan ke tukang “*turap*” (*Ulu-ulu*) . Air sebagai kebutuhan dasar dalam bidang pertanian mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan petani. Jika air yang dibutuhkan dirasa masih kurang, maka petani akan berusaha untuk mencukupinya dengan berbagai cara. Cara-cara inilah yang biasanya melahirkan suatu kebiasaan yang salah, sehingga merugikan petani lainnya. Pencurian air tidak hanya dilakukan oleh petani saja, tetapi juga dilakukan oleh *Ulu - ulu*. Seperti halnya yang diungkapkan Oleh Robi:

“Apalagi kalau musim kemarau, pintu pengambilan itu harus dijaga. Karena kalau gak seperti itu, banyak ulu-ulu yang nakal. Malam-malam kadang ya buka air. Biar airnya masuk ke wilayahnya sendiri”.(Wawancara Tanggal 10 November 2017, Pukul 08.00 WIB

3. Peran IPAIR untuk Pemeliharaan Sarana Irigasi

Ipair adalah iuran yang diserahkan oleh petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diterima. Undang undang (UU) Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan pasal 14 ayat (2) menetapkan bahwa masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan – bangunan pengairan dapat diikut sertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan. Menurut Suzanne (1995:14) Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum bagi diterapkannya Ipair. Dalam penerapan Ipair, beberapa kriteria yang digunakan antara lain:

- Ipair wajib dibayar oleh pemakai air bila menerima pelayanan irigasi sebagaimana disepakati. Kalau tidak ada pelayanan irigasi, Ipair tidak dipungut.
- Tarif Ipair ditetapkan oleh Bupati atas dasar kesepakatan antara petani (diwakili oleh gabungan P3A) dengan pemerintah daerah. Besarnya tarif sebagai target didasarkan pada kebutuhan O & P dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pelayanan irigasi, macam tanaman, musim dan sebagainya.
- Dana Ipair yang terkumpul dari suatu daerah hanya digunakan untuk membiayai O& P irigasi di daerah yang bersangkutan.
- Dana Ipair hanya boleh digunakan untuk membiayai O & P yang rutin dan berkala, tidak untuk membiayai pembangunan atau rehabilitasi.

Dalam program pengguna air irigasi, para masyarakat Kesambirampak yang memanfaatkan ai irigasi nantinya akan menanggung biaya. Bagi para petani yang



menggunakan jasa irigasi akan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000-Rp. 30.000. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Samsul:

“ya petani bayar IPAIR. Kalau tanaman Padi itu biasaya 30 ribu per lokke (tiap petak). Kalau Palawaija 25ribu. Ya kadang ada juga petani yang gak bayar. Bayarnya setiap tiga bulan sekali itu,waktu petani sudah panen”. (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2017,Pukul 18.30 WIB).

4. Proses Penyelesaian Konflik yang Dilakukan Oleh HIPPA

Air sebagai anugerah dari Tuhan , dapat memberikan manfaat yang bersifat positif bagi manusia apabila dimanfaatkan dengan benar. Adanya anggapan bahwa air irigasi adalah barang publik (*public goods*) menyebabkan pertentangan kebutuhan (*conflict interest*) sehingga menyebabkan masyarakat kurang efisien dalam menggunakan air. Dalam sektor pertanian khususnya untuk mencapai pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan, maka diperlukan penyesuaian kelembagaan dalam pengelolaan irigasi, baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga desa.

Realita yang terjadi di Kesambirampak Sanksi tersebut sayangnya dalam pelaksanaan hanya berbentuk teguran. Sebagaimana S mengungkapkan :

“Ya aturannya kalau missal ada petani melanggar. Kembali sesuai aturan dengan AD/ART itu. Tapi ya itu dek. meski ada aturan AD/ART itu kalau ada petani yang melanggar paling ya cuma di tegur. Gak ada sanksi yang jelas. Kalau misalnya Sub-blok ya paling cuma sekedar peringatan itu”. (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 18.30 WIB).

Penerapan sanksi yang tidak jelas inilah menyebabkan terjadinya konflik dikalangan petani pengguna air irigasi. Dalam hal ini, permasalahan konflik pengguna air irigasi termasuk dalam konflik terbuka. Di desa Kesambirampak konflik tersebut berupa tindakan yang dilakukan oleh petani dengan petani lain yaitu saling merebut mencuri air. Susan (2008: 100) mengatakan konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Sehingga perlu adanya campur tangan oleh pihak pemerintah ataupun petugas dari desa untuk menyelesaikan berbagai tindakan yang terjadi di desa Kesambirampak.



Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam Tata kelola irigasi pertanian mengalami banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat tani yang ada di desa Kesambirampak. Hal ini disebabkan lembaga HIPPA tersebut mengalami penurunan aktivitasnya karena adanya disharmoni organisasi dan menguatnya faktor kepentingan yang dilakukan oleh petugas-petugas dari lembaga tersebut. Akibat selanjutnya adalah melemahnya koordinasi dalam organisasi HIPPA secara keseluruhan. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya politik uang dalam distribusi air.

Daftar Pustaka

- Cresswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Duverger, Maurice.1998.*Sosiologi Politik*.Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- E, Suzanne. 1996. *Irigasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ferystiawan, Mirza. 2010. *Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus*.Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Jayanti,Nur.2006. *Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasandaran, Efendi.1988.*Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi*. Jakarta:PT.Gramedia.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University.
- Pusposutardjo, Suprodjo.2001. *Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Soekanto,Soerjono.2012.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratiyah,Ken. 2015. *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya.



Susan,Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta : Kencana.

Syahyuti. 2006. *Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian*. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwara.

Syahyuti, dkk. 2014. *Organisasi Kesejahteraan Petani*. Bogor : IPB Press.

Yuswadi, Hary. 2005. *Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jember: Kompyawisda Jatim.

----- . 2001. *Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan*. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

